

ABSTRAK

Salah satu instrument dalam penyelenggara pemerintah daerah adalah DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD mempunyai Fungsi Legislasi yang dijalankan bersama Kepala Daerah. Fungsi legislasi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Anggota DPRD juga memiliki hak-hak tertentu, salah satunya adalah Hak Inisiatif sebagai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan daerah dimana Peraturan Daerah mengatur muatan lokal kekhususan daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Pada tahun 2021 DPRD Kabupaten Jombang memiliki hak inisiatif yang tinggi. Namun pada tahun 2022 - 2023 penggunaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Jombang menurun drastis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Jombang. (1). Bagaimana peranan fungsi legislatif DPRD kabupaten jombang tahun 2022-2023 ada usulan inisiatif dari DPRD? (2). Apakah factor dan penghambat dalam menjalankan fungsi legislative usul inisiatif DPRD?

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *library research* yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan bahan dengan menggunakan Kode etik DPRD. Dalam penelitian ini dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) bagaimana peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022-2023 ada usulan inisiatif dari DPRD (2) apakah faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsi legislasi usul inisiatif DPRD Selanjutnya ada dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah antara lain meliputi empat tahapan, terdiri dari ; tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahapan pembahasan, dan tahap pengesahan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa dalam proses fungsi legislasi DPRD selama tahun 2022-2023 mengalami kemunduran dimana DPRD semakin pasif. Hak inisiatifnya menjadi berkurang hingga tidak digunakan sama sekali. Namun proses pelaksanaan fungsi legislasinya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi fungsi legislasasi DPRD ini diantaranya adalah SDM yang kurang mumpuni, molornya proses pembentukan RAPERDA, dan kurang melibatkan masyarakat.**Kata Kunci :BAPEMPERDA, Peraturan Daerah, kabupaten**



jombang

ABSTRACT

One of the instruments in implementing local government is the DPRD which is a regional people's representative institution. The DPRD has a Legislative Function which is carried out with the Regional Head. The legislative function of the DPRD is the function of forming regional regulations with the regional head which must be guided by what has been stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislative Regulations. To carry out these functions DPRD members also have certain rights, one of which is the Right of Initiative as the right to submit draft regional regulations. Regional regulations are one of the important instruments in regional government where regional regulations regulate local content specific to regions that are not regulated in the law. In 2021 the Jombang Regency DPRD has high initiative rights. However, in 2022 - 2023 the use of the initiative rights of the Jombang Regency DPRD will decline drastically. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the legislative function of the Jombang Regency DPRD. (1). What is the role of the legislative function of the Jombang district DPRD in 2022-2023, is there an initiative proposal from the DPRD? (2). What are the factors and obstacles in carrying out the legislative function of the proposed DPRD initiative?

This research uses a library research type that examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach and a material approach using the DPRD's code of ethics. This research is limited by two research focuses, namely (1) what is the role of the legislative function of the Jombang Regency DPRD in 2022-2023, there are proposals for initiatives from the DPRD (2) what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the legislative function of the DPRD initiative proposal? Furthermore, there are two legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials.

The results of this study indicate that the formation of regional regulations includes four stages, consisting of; assessment stage, planning stage, discussion stage, and validation stage. From the results of the study it was also found that in the legislative function process the DPRD during 2022-2023 experienced a setback where the DPRD became



increasingly passive. The right of initiative is reduced until it is not used at all. However, the process of implementing its legislative function has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are still obstacles that affect the legislative function of the DPRD, including inadequate human resources, delays in the process of establishing the RAPERDA, and lack of community involvement. Keywords: BAPEMPERDA, Regional Regulation, jombang district

